

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Media massa merujuk pada alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Menurut Bungin (2006) dalam Habibie (2018) media massa didefinisikan sebagai sarana komunikasi dan informasi yang berfungsi menyebarkan pesan secara luas serta dapat diakses oleh khalayak ramai. Dari sisi maknanya, media massa merupakan instrumen atau wadah untuk mendistribusikan berita, opini, komentar, hiburan, dan berbagai bentuk pesan lainnya.

Menurut Cangara (2010), media merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada audiens. Adapun media massa dipahami sebagai perangkat yang digunakan dalam menyalurkan pesan dari sumber kepada khalayak melalui berbagai bentuk alam komunikasi seperti surat kabar, radio, film, maupun televisi (Habibie, 2018). Praktio (2003) menjelaskan bahwa sebagai alat komunikasi, media menjadi unsur penting yang membuat membuat komunikasi massa selalu terkait dengan media massa. Media massa dipahami sebagai penerapan suatu perangkat teknis yang berperan menyalurkan sekaligus wadah bagi berlangsungnya komunikasi massa (Yoserizal, 2018).

Media massa kini lebih dikenal sebagai bagian kehidupan manusia yang menjadi dasar dari kebutuhan hidup. Media massa diperlukan manusia dalam memperoleh informasi serta menjadi petunjuk bagi perilaku manusia terhadap suatu peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Nur Arifin, 2023). Media massa dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyajikan hasil kerja aktivitas jurnalistik. Istilah yang digunakan oleh publik dalam mereferensi tempat publikasi sebuah berita adalah media massa. Karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan disebarluaskan melalui media massa. Setiap berita dalam praktik jurnalistik akan kehilangan maknanya apabila tidak didukung atau dipublikasikan oleh berita. Jadi, media massa adalah tempat untuk menyampaikan berita (Yoserizal, 2018).

Penyampaian informasi dalam bentuk berita memerlukan sebuah saluran komunikasi yang dikenal dengan istilah media. Media massa disebut demikian

karena berfungsi sebagai sumber bacaan bagi publik. Media massa berperan dalam menyajikan informasi mengenai perubahan, proses yang berlangsung, serta hasil yang telah atau akan dicapai. Fungsi pokok media massa adalah menyediakan informasi bagi kepentingan umum yang luas serta menjadi sarana promosi produk. Media massa, dalam fungsi apa pun yang dijalankannya, berujung pada produksi informasi. Media massa dituntut untuk mampu menyajikan informasi mengenai beragam isu publik yang dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

Media massa tidak sepenuhnya merefleksikan realitas secara objektif, melainkan merupakan hasil dari proses seleksi, interpretasi, dan framing tertentu. Proses inilah yang disebut sebagai konstruksi realitas, yakni bagaimana media membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa melalui penggunaan pilihan kata, sudut pandang, serta narasi yang digunakan. Isi media pada hakikatnya merupakan hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat utama. Bahasa tidak hanya berfungsi merepresentasikan realitas, tetapi juga membentuk gambaran tertentu mengenai realitas tersebut. Oleh karena itu, media massa memiliki peluang besar dalam memengaruhi makna serta citra yang muncul dari realitas yang dikonstruksikannya (Eriyanto, 2002).

Teori Konstruksi Sosial atas Realitas pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui *"The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge"* (1966). Teori ini mendefinisikan konstruksi sosial sebagai suatu proses sosial yang berlangsung melalui tindakan dan interaksi, di mana individu maupun kelompok secara berkelanjutan membangun realitas yang dimiliki serta dialami secara subjektif dalam masyarakat. Berakar pada paradigma konstruktivis, teori ini menekankan bahwa realitas sosial merupakan hasil ciptaan individu sebagai makhluk bebas. Dengan demikian, individu dipandang sebagai aktor utama yang membentuk dunia sosial sesuai kehendaknya, bahkan memiliki kebebasan bertindak melampaui batasan struktur maupun pranata sosial. Oleh karena itu, manusia dianggap sebagai subjek yang menciptakan realitas sosial dengan Tingkat kebebasan yang relatif luas.

Teori konstruksi realitas sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengalami pembaruan dengan mempertimbangkan hadirnya fenomena media massa. Pembaruan tersebut menjadikan teori ini semakin signifikan dalam menjelaskan proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dengan kata lain, keberadaan serta keunggulan media massa mampu melengkapi sekaligus memperbaiki keterbatasan dalam proses konstruksi atas realitas sebelumnya. Pokok utama konstruksi sosial melalui media massa terletak pada peredaran informasi yang berlangsung cepat dan luas, sehingga pembentukan realitas sosial terjadi secara intensif dan merata (Anggraini, 2020).

Bungin (2008:203) menjelaskan bahwa konsep “konstruksi sosial media massa” hadir untuk melengkapi sekaligus mengoreksi keterbatasan “konstruksi sosial atas realitas.” Konstruksi sosial yang berlangsung melalui media massa bekerja dengan memanfaatkan seluruh keunggulan media dalam menyebarkan informasi secara luas, sehingga realitas dikonstruksikan memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan konstruksi sosial di luar konteks media. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahap penting, yaitu penyusunan materi konstruksi, penyebaran konstruksi, pembentukan konstruksi, hingga tahap konfirmasi. Keempat tahapan tersebut menggambarkan bagaimana institusi media mengolah realitas menjadi berita maupun iklan yang kemudian diterima oleh khalayak. Dengan demikian, konstruksi sosial media massa tidak hanya terkait dengan aspek narasi, melainkan juga dengan mekanisme produksi informasi yang dipengaruhi oleh kepentingan media itu sendiri.

Konstruksi realitas yang dilakukan media sering kali diwujudkan melalui mekanisme framing. Eriyanto (2007) menjelaskan bahwa framing merupakan cara media menyeleksi isu, menonjolkan aspek tertentu, serta mengabaikan aspek lainnya. Melalui framing, media tidak hanya sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga memberikan penafsiran dan makna tertentu yang memengaruhi bagaimana publik memahami suatu peristiwa. Dengan demikian, konstruksi realitas yang dihasilkan media bersifat tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan tertentu, serta rutinitas kerja jurnalistik. Faktor-faktor tersebut membuat realitas yang ditampilkan media menjadi hasil framing yang memengaruhi cara masyarakat membentuk persepsi dan sikap terhadap suatu isu.

Akibatnya pemahaman publik mengenai peristiwa sangat bergantung pada bingkai yang digunakan media. Oleh karena itu, analisis terhadap konstruksi media menjadi krusial untuk menelaah bagaimana suatu peristiwa dimaknai sekaligus diterima oleh khalayak.

Perkembangan media massa sangat penting untuk mendukung beragam aktivitas masyarakat saat ini. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat dan mengikuti perkembangan zaman. Karena media merupakan perpanjangan dari bahasa dan tangan manusia, media berkontribusi pada kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur sosial (Rivers, 2004:27). Masyarakat saat ini menuntut informasi yang cepat, sehingga media massa memanfaatkan kebutuhan tersebut untuk menjalankan fungsinya sebagai penyampai informasi, sarana edukasi, pembentuk opini, dan penyebar ilmu pengetahuan kepada khalayak. Dalam rangka memenuhi tuntutan itu, media massa secara aktif memproduksi berbagai konten yang bersifat aktual, cepat, dan orisinal.

Digitalisasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, umat manusia telah menciptakan era industri baru. Perkembangan ini juga mendorong kemajuan teknologi yang semakin kompleks, termasuk di bidang komunikasi dan media informasi. Pada akhirnya, digitalisasi telah melahirkan media baru. Berkat media baru ini, komunikasi kini dimungkinkan diakses melalui internet. Sebagai media komunikasi, internet pada dasarnya bersifat transaksional, artinya terdapat interaksi yang intens antar individu dan adanya umpan balik dalam interaksi tersebut. Manusia berbondong-bondong menciptakan media baru agar lebih praktis (Mustikasari et al., 2022).

Media baru ini berbeda dengan media kontemporer sebelumnya, seperti televisi, radio, surat kabar, dan media konvensional lainnya. Hal ini karena media baru atau digital dapat diakses oleh siapa saja, tanpa persyaratan apa pun. Dengan akses internet, siapa pun dapat menggunakan media baru dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Dengan media baru ini, masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan internet.

Dengan hadirnya media baru, akses informasi melalui internet menjadi sangat mudah. Didorong oleh digitalisasi, media komunikasi dan informasi juga telah berevolusi, seperti media online. Media online merupakan media massa yang tersaji secara online di situs *web (website)* di internet. Kehadiran media online ini menjadi tonggak penting dalam evolusi media massa, karena memungkinkan penyebaran informasi secara instan, jangkauan yang luas, dan interaktif. Kemunculan media online bermula dari digitalisasi dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat. Media baru, atau media online, dapat didefinisikan sebagai produk komunikasi yang didukung oleh komputer digital atau teknologi canggih lainnya (Creeber dan Martin, 2009 dalam Mustikasari et al., 2022).

Media online sendiri merupakan media baru, berbeda dari media massa kontemporer seperti media cetak dan elektronik. Masyarakat dapat mengakses dan menggunakan media online ini melalui perangkat berbasis komputer dan koneksi internet untuk mencari dan menerima informasi yang mereka butuhkan. Selain itu, internet yang menjadi sarana utama dalam mengakses media online bersifat tanpa batas. Artinya, setiap pengguna internet memiliki kebebasan untuk mengakses berbagai jenis informasi serta memproduksi dan menyajikan karya jurnalistik seperti berita, artikel, maupun feature secara daring.

Dalam era perkembangan teknologi komunikasi, konstruksi realitas tidak lagi terbatas pada media konvensional, melainkan bergeser ke media online yang memiliki keunggulan dalam kecepatan, interaktivitas, dan jangkauan yang lebih luas. Perkembangan teknologi digital tersebut telah mendorong kemunculan media online sebagai sarana baru dalam pembentukan realitas sosial. Di Indonesia, media online berperan sebagai salah satu sumber utama masyarakat untuk memperoleh informasi serta membentuk persepsi terhadap berbagai isu publik.

Menurut Romli, A. S. M (2018) dalam bukunya yang berjudul “Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online”, media online merupakan “generasi ketiga” media massa, setelah media cetak seperti surat kabar, tabloid, majalah, dan buku, serta media elektronik seperti radio, televisi, dan film/video. Media online termasuk ke dalam kategori *cyber journalism* atau jurnalisme daring, yaitu kegiatan jurnalistik yang memproduksi dan mendistribusikan laporan faktual atau peristiwa

melalui jaringan internet. Dengan demikian, media online dapat dipahami sebagai media berbasis teknologi komunikasi dan multimedia (komputer dan internet), yang meliputi berbagai platform seperti situs web, blog, radio online, televisi online, serta surat elektronik (email).

Media online di Indonesia tumbuh pesat dan menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam mengakses informasi sekaligus membangun persepsi terhadap isu publik. Kemajuan media online juga memicu fenomena baru, yaitu munculnya media lokal berbasis daring di berbagai daerah di Indonesia. Media lokal memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi mengenai peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat karena dengan menyajikan berita mengenai peristiwa lokal, berarti tetap terdapat arus informasi yang berimbang dan tidak hanya berfokus pada isu nasional.

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang spesifik dan relevan dengan konteks lokal tumbuh seiring dengan beragamnya dinamika sosial dan politik di berbagai daerah di Indonesia. Media nasional biasanya berfokus pada isu-isu berskala besar, seperti politik nasional, ekonomi makro, atau bahkan kebijakan pemerintah pusat, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat akan informasi yang lebih relevan terkait kegiatan sehari-hari mereka. Dalam situasi tersebut, media lokal menjadi alat penting dalam mengisi kesenjangan informasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pemberitaan yang berfokus pada isu-isu dari dalam daerah itu sendiri, media lokal berupaya menghadirkan informasi mengenai peristiwa sosial, budaya, ekonomi, dan politik di tingkat lokal.

Media lokal merupakan sumber informasi yang relevan dan terhubung dengan realitas sosial setempat karena keberadaannya dan fokusnya dalam mengkaji berbagai aspek kehidupan masyarakat dan situasi regional. Selain menyediakan berita, media lokal berfungsi sebagai jendela informasi mengenai aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Hamzah (2001) dalam Susanto (2020) bahwa media tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya yang diharapkan oleh pemirsa, pendengar, atau pembacanya. Oleh karena itu, media lokal bertugas menyampaikan

informasi yang relevan dengan nilai-nilai dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, sekaligus memperkuat identitas dan karakter daerah.

Posisi media lokal juga semakin diperkuat secara signifikan oleh transisi masyarakat menuju era informasi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat modern kini menuntut informasi yang tepat waktu, andal, dan relevan. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah daerah, isu-isu pembangunan, dan isu-isu sosial berkaitan erat dengan kondisi ini. Di sisi lain, media nasional masih kesulitan memahami dan menghayati konteks lokal di setiap daerah. Akibatnya, muncul sejumlah kanal media lokal, termasuk media daring lokal, yang berfokus pada kebutuhan masyarakat. Media lokal bukan hanya sarana penyebaran informasi, tetapi juga wadah bagi publik untuk menyalurkan aspirasi dan membangun kesadaran kolektif terhadap setiap permasalahan yang terjadi di daerah mereka. Media lokal berperan sebagai agen sosial yang membantu membentuk opini publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Ekosistem media lokal Indonesia telah mengalami perubahan substansial akibat transformasi digital. Banyak media lokal telah beralih ke platform daring, dari sebelumnya berfokus pada siaran cetak atau radio. Meningkatnya ketersediaan internet dan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap konsumsi berita digital merupakan penyebab utama perubahan ini. Berkat kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat dan interaktif, lahirlah media daring lokal. Masyarakat lokal dapat dengan mudah memperoleh berita yang relevan dengan lingkungan mereka melalui media internet, bahkan dapat terlibat langsung melalui media sosial dan kolom komentar.

Media lokal memiliki karakteristik yang membedakannya dari media nasional. Media lokal merupakan media massa yang memiliki konten yang bersifat kedaerahan dengan porsi besar pada isu-isu yang relevan dengan masyarakat lokal. Informasi dari luar daerah tetap hadir, namun hanya sebagai pelengkap. Muatan lokal ini menjadi basis utama bagi pengembangan isu-isu kedaerahan yang dianggap penting bagi masyarakat setempat (Sutrisno, 2011 dalam Prastya & Ningsih, 2021).

Isu-isu lokal dianggap sangat penting dalam studi manajemen media karena pertama, kegiatan media terikat oleh suatu konteks tertentu, yaitu konteks politik dan budaya setempat. Kedua, lokal adalah tempat di mana praktik media yang nyata berlangsung, sehingga di tingkat lokal, hubungan antara media dan audiens terjalin. Dalam konteks yang lebih luas, lembaga media berupaya untuk menyesuaikan kontennya agar lebih relevan dengan konteks lokal, dengan harapan konten tersebut bisa diterima oleh audiens di tingkat lokal (Rahayu, 2017) dalam (Prastya & Ningsih, 2021).

Lebih jauh, identitas sosial dan budaya masyarakat lokal tercermin dalam media lokal. Menurut Franklin dan Murphy (1998), sebuah media dapat diklasifikasikan sebagai lokal jika dimiliki dan dioperasikan secara lokal, mempekerjakan penduduk lokal, dan berfokus pada isu-isu lokal. Hal ini menunjukkan bahwa media lokal memiliki beragam tujuan jurnalistik, orientasi nilai, serta jangkauannya. Isu-isu seperti pembangunan daerah, kebijakan pemerintah kota atau kabupaten, dan isu-isu sosial yang muncul di masyarakat merupakan beberapa topik yang ingin diangkat oleh media lokal karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat setempat. Akibatnya, media lokal lebih terhubung secara emosional dan kultural dengan pemirsanya, yang meningkatkan signifikansi dan dampak liputan mereka (Badiang, 2023).

Oleh karena itu, media lokal di Indonesia merupakan komponen penting dari sistem komunikasi publik demokratis yang berfokus pada kebutuhan daerah, bukan sekadar pelengkap media nasional. Media lokal merepresentasikan identitas sosial budaya suatu daerah, bertindak sebagai penghubung antara publik dan pemerintah daerah, serta menyediakan wadah bagi partisipasi warga. Terlepas dari pesatnya globalisasi dan maraknya media nasional, media lokal tetap penting sebagai pengelola pengetahuan lokal dan sebagai sarana untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi di tingkat daerah.

Kedekatan media lokal dengan masyarakat membuatnya memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengawasi proyek pemerintahan. Berbagai fenomena sosial dan pemerintahan di tingkat lokal menjadi fokus utama liputan media lokal karena berakar kuat pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Selain

menyebarkan informasi, media lokal juga berperan sebagai pengawas sosial atas tindakan dan kebijakan pemerintah daerah. Proyek pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana atau bahkan terbengkalai merupakan salah satu masalah yang kerap disorot media lokal. Korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek publik seringkali berkaitan dengan masalah ini.

Korupsi dan proyek-proyek mangkrak di Indonesia telah menjadi isu utama bagi berbagai sektor pembangunan. Berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terhenti di tengah jalan, tanpa solusi atau pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana tersebut. Selain berdampak negatif terhadap keuangan negara, kondisi ini berdampak negatif secara langsung terhadap kepercayaan publik terhadap proses pembangunan daerah dan nasional serta lembaga-lembaga pemerintah.

Korupsi adalah istilah umum yang mencakup berbagai tindakan salah yang menyalahgunakan tanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, ketika topik korupsi dibahas, niat dan keuntungan pelaku korupsi akan turut menjadi pokok pembahasan. Korupsi merupakan perilaku curang yang secara teratur dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki niat tidak etis, untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui jalan pintas (Cuervo-Cazurra, 2015 dalam Hetami & Aransyah, 2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 menyoroti bahwa sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) merupakan area paling rawan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, sektor PBJ tercatat mendominasi praktik suap dan gratifikasi, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun di lingkungan pemerintah daerah. Risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ bahkan mencapai 97% di kementerian/lembaga dan 99% di pemerintah daerah, dengan lebih dari separuh responden internal mengakui adanya penyimpangan dalam sektor ini. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi pada sektor PBJ masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia dan berpotensi besar menimbulkan proyek-proyek pembangunan yang tidak selesai atau mangkrak.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, yang menunjukkan bahwa praktik korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi salah satu sumber utama kerugian negara. Berdasarkan laporan penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 250 dari 579 kasus atau sekitar 43% berkaitan dengan PBJ. Dari jumlah tersebut, sekitar 58% merupakan kasus yang melibatkan PBJ di bidang pembangunan infrastruktur. Data ini mengindikasikan bahwa korupsi dalam sektor infrastruktur tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga berpotensi besar menyebabkan proyek-proyek mangkrak akibat penyalahgunaan anggaran dan rendahnya pengawasan di lapangan. ICW juga mencatat bahwa tingkat korupsi infrastruktur di lapangan kemungkinan jauh lebih tinggi dibandingkan angka penindakan yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum.

Persoalan proyek mangkrak akibat dugaan korupsi bukan hanya menjadi keprihatinan masyarakat, tetapi juga telah mendapat perhatian serius dari pemerintah di tingkat tertinggi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menyatakan tidak boleh ada fasilitas maupun aset milik pemerintah yang dibiarkan mangkrak dan tidak berfungsi. Hal tersebut disampaikan melalui arahan langsung kepada jajaran menteri, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar sebagaimana dikutip dari laman web Suara.com pada tahun 2025:

"Presiden memberikan arahan tidak boleh ada fasilitas punya pemerintah yang mangkrak, idle, tidak berfungsi dengan baik. Gunakanlah ruang-ruang, tempat-tempat dan fasilitas yang dimiliki pemerintah untuk mendorong tumbuh kembangnya pemberdayaan masyarakat kita."

Lebih jauh, komitmen tersebut juga tercermin dalam kebijakan konkret berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD, yang menegaskan pentingnya setiap anggaran negara digunakan secara terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, proyek yang dibiayai oleh anggaran publik namun berakhir mangkrak bukan hanya merupakan persoalan hukum semata, melainkan juga merupakan pelanggaran terhadap amanat pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan bertanggung jawab.

Pola korupsi yang terjadi pada sektor infrastruktur di tingkat nasional sejatinya juga dapat ditemukan pada konteks daerah. Di wilayah Kota Mojokerto, di mana sejumlah proyek pembangunan terhenti atau mangkrak akibat dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa persoalan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa tidak hanya menjadi isu di level nasional melainkan juga terjadi pada level daerah yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pandangan publik terhadap korupsi dan akuntabilitas pemerintah daerah dibentuk oleh liputan media lokal, yang berperan penting sebagai pengawas sosial (*social control*). Melalui pemberitaan di media lokal, publik dapat mengetahui sejauh mana kasus proyek mangkrak terjadi serta bagaimana isu korupsi dalam pembangunan dikonstruksi di media online lokal.

Radar Mojokerto, sebagai salah satu media yang berfokus pada tingkat lokal atau daerah memiliki peran penting dalam mengungkap dan memberitakan kasus proyek mangkrak tersebut kepada publik. Salah satu proyek yang menarik untuk dibahas adalah pembangunan pujasera berbentuk kapal Majapahit di Taman Bahari Mojopahit (TBM). Proyek yang awalnya digadang-gadang menjadi ikon kompleks wisata edukasi kini tersandung kasus korupsi dan mangkrak. Diketahui bahwa proyek ini pertama kali digarap pada tahun 2023 lalu yang sejak awal dibangun diproyeksikan sebagai pujasera kini kondisinya mangkrak. Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto bahkan menyegel proyek tersebut pada 13 Januari 2025 karena adanya indikasi penyimpangan proyek senilai Rp 2,5 miliar.



Gambar 1.1 Proyek mangkrak pujasera Taman Bahari Mojopahit disegel Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto

Sumber: Radarmojokerto.jawapos.com yang telah diolah kembali

Isu dugaan korupsi dibalik mangkraknya proyek ini sebenarnya sudah menjadi pertanyaan besar di kalangan publik sejak pertengahan 2024. Proyek yang seharusnya dijadwalkan rampung pada tahun 2023 kini kondisinya kian memprihatinkan dan terbengkalai. Dikutip dari laman berita online Radar Mojokerto dengan judul “*Proyek Gagal Ikon Taman Bahari Mojopahit*” sejumlah titik bangunan sisi luar telah mengalami kerusakan. Bagian bawah lambung kapal yang terbuat dari tripleks telah robek dan terlepas. Pada bagian dalam, kerangka besi *hollow* yang terpasang pada lambung kapal telah berkarat dan yang paling miris adalah bagian dalam kapal yang menjadi sasaran vandalisme.



Gambar 1.2 Proyek mangkrak pembangunan pujasera di Taman Bahari Mojopahit

Sumber: Radarmojokerto.jawapos.com yang telah diolah kembali

Penyelidikan atas proyek ini kemudian mengungkap bahwa pembangunan kapal Majapahit tersebut ditemukan indikasi pelanggaran pengerjaan proyek di bawah spesifikasi, terdapat aspek dalam kontrak yang belum terpenuhi, hingga pengkondisian pemenang dalam proses *e-purchasing*. Hasil audit BPKP Jawa Timur memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1,9 miliar dari total pagu proyek Rp 2,5 miliar. Hingga pada 24 Juni dan 30 Juni 2025, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto menetapkan dan melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka dari kasus tersebut. Sejumlah pejabat Dinas PUPR Perkim Kota Mojokerto dan pihak kontraktor termasuk ke dalam daftar tersangka.

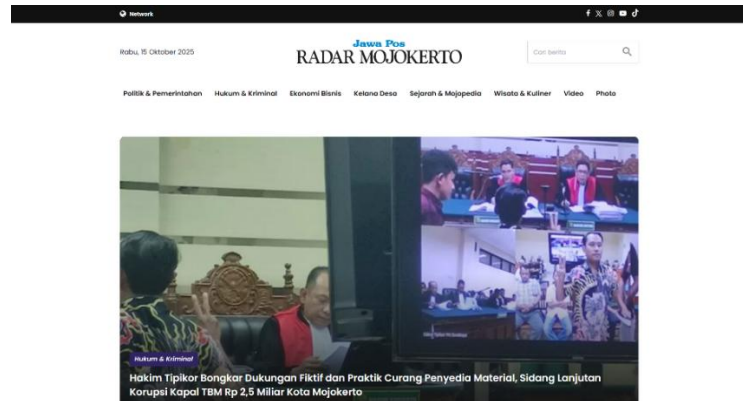
Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terungkap adanya dugaan praktik curang hingga indikasi dokumen fiktif berupa permintaan “memo

kosong” dari CV Harsya Putra Mandiri selaku pelaksana kegiatan proyek tersebut. Salah satu saksi menyebut bahwa beberapa dokumen hanya dibuat secara administratif tanpa transaksi nyata. Pihak pengadilan kemudian menyoroti bahwa proyek ini gagal diselesaikan secara paripurna karena lemahnya kontrol mutu dan tanggung jawab pembayaran. Terutama karena sejumlah vendor mengaku belum menerima pelunasan. Hal tersebut menjadi bukti tambahan bahwa alur dana proyek tidak sepenuhnya jelas.

Hingga Oktober 2025, proses hukum terhadap para tersangka masih berjalan. Salah satu tersangka bahkan mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* (JP) untuk membantu penyidik membongkar otak korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,9 miliar. Kasus ini menarik perhatian masyarakat umum dan media lokal karena menunjukkan buruknya pengelolaan proyek pemerintah daerah dan memudarnya kepercayaan publik terhadap pembangunan publik. Radar Mojokerto memainkan peran penting dalam mengonstruksi persepsi publik tentang siapa yang bersalah, besarnya kerugian, dan cara yang tepat untuk menegakkan keadilan.

Radar Mojokerto merupakan salah satu anak perusahaan dari grup media Jawa Pos yang beroperasi di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Jawa Pos sendiri telah berdiri sejak tahun 1949 oleh The Chung Shen dengan nama Djawa Pos kemudian dikembangkan lagi oleh Dahlan Iskan pada 1982 dan dikenal lebih luas dengan nama Jawa Pos News Network (JPNN). Resmi berdiri pada 1 Maret 2001, Jawa Pos Radar Mojokerto mengusung slogan “Lain dari yang Lain”, dan berfokus pada pemberitaan lokal yang mencakup Mojokerto, Jombang, dan Krian.

Dalam perjalanannya, Jawa Pos Radar Mojokerto terus berinovasi. Pada tahun 2022, Jawa Pos Radar Mojokerto mulai memperkuat eksistensinya di ranah digital sebagai respon terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Jika sebelumnya mayoritas konten disajikan melalui media cetak, maka sejak 2022, Radar Mojokerto lebih serius dalam mengembangkan kanal pemberitaan berbasis digital yang lebih responsif, visual, dan ramah terhadap perangkat seluler. Hal ini mencakup pengoptimalan dua portal berita daring utama, yaitu Radar Mojokerto dan Radar Majapahit, serta peningkatan frekuensi dan kualitas konten di media sosial, seperti Instagram dan TikTok.



Gambar 1.3 Laman resmi berita online Radar Mojokerto

Sumber: Radarmojokerto.jawapos.com yang telah diolah kembali

Pada kasus dugaan korupsi proyek TBM, Radar Mojokerto bukan hanya berperan sebagai pengantar informasi, tetapi juga agen konstruksi realitas sosial. Tata letak diksi, sudut pandang berita, dan penonjolan aktor tertentu dalam berita dapat memengaruhi bagaimana publik memahami siapa yang dipandang bertanggung jawab, seberapa besar kesalahan yang terjadi, serta bagaimana kasus tersebut merepresentasikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kota Mojokerto. Pemberitaan semacam ini memperlihatkan bagaimana media lokal memiliki kekuatan simbolik dalam membentuk kesadaran publik terhadap isu korupsi, sekaligus menjadi cermin dinamika hubungan antara media, kekuasaan, dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas, diperlukan kajian terhadap tanda dan makna yang muncul dalam teks yang dapat dijelaskan melalui perspektif semiotika.

Semiotika merupakan salah satu metode penelitian komunikasi yang paling interpretatif dalam menganalisis teks, dan keberhasilan maupun kegagalannya sebagai sebuah metode bersandar pada seberapa baik peneliti mampu mengartikulasi kasus yang mereka kaji. Tradisi semiotika terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, dan kondisi, diluar tanda-tanda itu sendiri (Efendi et al., 2023). Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Kata “semiotika” berasal dari Bahasa Yunani, yakni “*Simeon*” yang berarti tanda. Semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda (Zoest,

1993:1 dalam Lantowa et al., 2017: 1). Semiotika adalah studi tentang tanda-tanda (*sign*), fungsi tanda, dan produksi makna. Dalam hal ini, tanda yang dimaksud nantinya dapat menunjukkan pada makna atau sesuatu hal lainnya yang tersembunyi di balik tanda itu sendiri. Dengan kata lain, keberadaan tanda ini nantinya akan mewakili suatu hal yang berkaitan dengan objek tertentu. Objek-objek tersebut dapat membawa informasi dan mengkomunikasikannya dalam bentuk tanda (Christomy & Lucky Yuwono 2004: 79 dalam Yudha Erlangga et al., 2021).

Teori semiotika yang digunakan oleh peneliti yaitu semiotika sosial yang berkembang dari pemikiran Michael Alexander Kirkwood (M.A.K.) Halliday yang merupakan seorang ahli bahasa Inggris. Semiotika sosial yakni semiotika yang khusus menelaah lambang, baik lambang berwujud kata maupun lambang berwujud bukan kata dalam satuan yang disebut kalimat. Dengan kata lain, semiotika sosial menelaah sistem tanda yang terdapat dalam bahasa (Turistiati, 2017). Semiotika sosial MAK Halliday digunakan untuk mengetahui bagaimana media Radar Mojokerto menkonstruksi dan menyajikan beritanya. Menurut teori ini, bahasa mencerminkan struktur sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis semiotika sosial sering digunakan untuk mempelajari makna di balik bahasa dan bagaimana bahasa digunakan untuk membangun identitas, kekuatan, dan hubungan sosial (Akhdani, 2023).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi peran media sebagai konstruksi sosial terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat. Umumnya, penelitian ini berfokus pada media nasional dan menggunakan pendekatan framing atau analisis wacana kritis. Namun, masih relatif sedikit penelitian media lokal yang menyelidiki bagaimana media lokal mengkonstruksi makna dari isu yang sama, terutama melalui pendekatan semiotika sosial. Dalam penelitian berjudul “Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk terhadap Kasus Korupsi pada Media Online detik.News” oleh Sari, Pariyasto et.al. pada tahun 2024 di Universitas Budi Darma, Indonesia, menyatakan bahwa penelitian analisis wacana kritis pada teks berita yang berjudul “Penyuap Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba di Kasus Korupsi Segera Diadili” pada media online detik.News menemukan ketiga dimensi struktur dalam wacana ini. Ketiga struktur yang ditemukan itu adalah struktur makro,

superstruktur, dan struktur mikro. Pada struktur mikro, hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana tersebut telah sesuai antara topik dan subtopik dengan tema berita. Pada bagian superstruktur terdapat ditemukan judul, situasi, dan komentar yang terstruktur dan saling mendukung. Sedangkan pada struktur mikro ditemukan koherensi, kata ganti, dan retorik yang menjadikan wacana pemberitaan kasus korupsi ini layak untuk dibaca dan dijadikan sebagai media online yang terpercaya. Dengan menggunakan analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk ini kita dapat melihat jika penulis memiliki ideologi yang ingin memberikan informasi kepada pembaca atau masyarakat dengan sebenar-benarnya. Hal ini terlihat dari tulisan yang menyertakan data dan fakta dari narasumber yang memiliki hubungan dan tanggung jawab terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara yaitu Abdul Gani Kasuba.

Penelitian berjudul “Islamofobia dan Konstruksi Media Online (Analisis Semiotika Sosial M.A.K Halliday pada Pemberitaan Media Online Barat Mengenai Qatar sebagai Tuan Rumah Piala Dunia 2022)” oleh Agung Ramadhan, H. F yang penelitiannya dilakukan pada tahun 2022 di Institut STIAMI, Jakarta, menemukan hasil bahwa, dari ketiga media online Barat yang diteliti, yakni Independent.com, Nbcnews.com, dan Ibtimes.com menampilkan pemberitaan yang subjektif, tidak profesional, dan provokatif mengenai penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Ketiganya lemah dalam verifikasi informasi serta membangun narasi yang cenderung menyudutkan Qatar sebagai tuan rumah. Independent.com menonjolkan narasi konstruktif yang memojokkan Qatar melalui ilustrasi kursi penonton kosong, Nbcnews.com menggiring opini negatif terkait pelarangan alkohol dan LGBTQ sebagai bentuk pelanggaran HAM, kemudian Ibtimes.com menekankan isu kursi kosong dan larangan alkohol untuk memperkuat citra negatif. Pemberitaan ketiga media tersebut berupaya membentuk opini publik bahwa penyelenggaraan Piala Dunia 2022 gagal, dengan mengaitkan kegagalan tersebut pada ketegasan Qatar dalam menerapkan syariat dan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa sebagian besar kajian konstruksi media berfokus pada media tingkat nasional dan internasional, sementara studi tentang peran media lokal masih terbatas. Padahal, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat setempat dan peran strategis dalam

mengkonstruksi isu-isu publik di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan yang mengkaji bagaimana media lokal seperti Radar Mojokerto membentuk pemahaman publik terhadap kasus proyek mangkrak di wilayahnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena menawarkan perspektif baru tentang bagaimana media lokal mengonstruksi isu korupsi di wilayahnya. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji konten berita, tetapi juga mengungkap makna sosial dan ideologis di balik bahasa yang digunakan berita. Dalam bahasan komunikasi massa, memahami konstruksi makna tersebut penting karena media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik dan memengaruhi opini publik tentang isu-isu sosial, termasuk korupsi di tingkat lokal.

Aspek kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teori semiotika sosial karya M.A.K. Halliday untuk menganalisis konstruksi media lokal terhadap isu dugaan korupsi dalam proyek mangkrak, yang sejauh yang diketahui peneliti belum ditemukan dalam studi sebelumnya. Selain itu, aspek kebaruan juga terletak pada pemilihan objek penelitian, yaitu media lokal Radar Mojokerto, yang memiliki kaitan yang erat baik secara geografis, sosial, maupun kultural dengan masyarakat Mojokerto. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis untuk pengembangan kajian komunikasi, khususnya dalam konteks analisis wacana dan media lokal yang berbasis pada semiotika sosial.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada posisi Radar Mojokerto sebagai media lokal yang memiliki kedekatan geografis dan budaya dengan masyarakat Mojokerto. Kedekatan ini membuat setiap narasi yang dihasilkan dalam pemberitaannya berpotensi kuat dalam membentuk citra pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, mengkaji bagaimana media lokal mengonstruksi isu tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran media dalam membentuk kesadaran publik di tingkat lokal serta menunjukkan dinamika hubungan antara media, kekuasaan, dan masyarakat lokal. Lebih lanjut, secara teoretis, penelitian ini memiliki poin penting untuk memperkaya kajian komunikasi dan media, terutama dalam konteks penggunaan teori semiotika sosial M.A.K. Halliday. Pendekatan ini

jarang digunakan dalam penelitian komunikasi di Indonesia, terutama di media lokal, tetapi memiliki potensi besar untuk mengungkap makna sosial tersembunyi di balik teks-teks media.

Melihat fenomena pemberitaan kasus dugaan korupsi mangkrak di Radar Mojokerto, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana media menciptakan melalui penggunaan bahasa dalam teks beritanya. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana konstruksi realitas berasal dari bahasa yang dipilih media dalam menyampaikan isu korupsi kepada publik. Analisis semiotika milik M.A.K Halliday digunakan dalam penelitian ini karena semiotika ini berfokus untuk menelaah sistem tanda yang diciptakan manusia dalam bahasa.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi makna media Radar Mojokerto dalam mewacanakan teks berita terkait isu dugaan korupsi di balik kasus proyek mangkrak melalui analisis wacana semiotika sosial M.A.K. Halliday?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konstruksi makna media Radar Mojokerto dalam mewacanakan isu dugaan korupsi di balik kasus proyek mangkrak melalui pendekatan semiotika sosial M.A.K. Halliday.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperkaya kajian komunikasi, khususnya dalam ranah ilmu semiotika sosial. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji bagaimana media lokal membentuk makna dan konstruksi sosial melalui pemberitaan isu publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk meningkatkan kesadaran pembaca terhadap cara media membentuk wacana melalui bahasa. Dengan demikian publik dapat lebih kritis dalam menafsirkan berita, terutama terkait isu sensitif seperti kasus korupsi, serta melihat sejauh mana media berperan dalam mendukung transparansi

informasi. Serta dapat memberikan umpan balik langsung kepada Radar Mojokerto, terutama dalam hal kesadaran penggunaan bahasa dan konstruksi makna dalam pemberitaan isu publik.